

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa.

Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridwan, 2019). Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 yang telah dialokasikan sebesar Rp 70 triliun untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa (kemenkeu.go.id).

Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa” (BPKP, 2020). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan

mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Alokasi pagu Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp 544.358.095.000,- Disalurkan untuk 416 Desa di wilayah Kabupaten Bogor Sampai dengan 20 April 2022, KPPN Bogor telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 193.070.195.600,- atau 35,47% dari pagu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 sebesar Rp 198.869.950.000,- DAK Fisik dialokasikan untuk disalurkan ke Pemda Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Sampai dengan 20 April 2022 belum ada realisasi karena belum ada penyaluran DAK Fisik disebabkan belum ada pengajuan penyaluran DAK Fisik dari Pemda. DAK Non Fisik Alokasi pagu pada tahun 2022 sebesar Rp 198.869.950.000,- DAK Non Fisik dialokasikan untuk disalurkan ke sekolah/lembaga pendidikan di wilayah Pemda Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Realisasi penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan 20 April 2022 sebesar Rp 423.399.433.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota Bogor 2022

Dana	Jumlah	Penyaluran
Dana Desa Non BLT	Rp 133.478.495.600,-	untuk 405 desa
BLT Desa Triwulan I	Rp 53.371.800.000,-	untuk 405 desa
BLT Desa Triwulan II	Rp 6.219.900.000,-	untuk 48 desa
BOS	Rp 360.094.227.000,-	untuk 3.473 sekolah
BOS PAUD	Rp 34.242.839.000,-	untuk 2.787 sekolah
BOP Kesetaraan	Rp 29.062.367.000,-	untuk 197 sekolah

Sumber: Kemenkeu, 2022

Perkembangan daerah yang dikelola dengan baik akan terlihat jika di daerah tersebut diterapkan beberapa program pengelolaan keuangan mulai dari RT, RW hingga warganya, akan tetapi ada beberapa program yang sudah mulai dijalankan walaupun masih belum sesuai dengan harapan namun kurun waktu 3 tahun terakhir ini telah menunjukkan adanya perubahan yang cukup bagus jika dibandingkan dengan sekitar tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter. Salah satu komunitas yang saat ini sudah dijalankan yaitu seperti adanya tabungan berjangka yang dikelola oleh Kumpulan

Pemuda Pemudi Kampung Pasir Bagadeu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan gaya hidup dan kebutuhan warga yang semakin meningkat mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan. Tidak hanya di Kampung Pair Bagadeu, ternyata sudah banyak daerah yang mengadakan program ini, hanya saja tabungan ini dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan secara pribadi bukan untuk kebutuhan Kampung Pasir Bagadeu secara meluas, karena untuk saat ini daerah Kampung Pasir Bagadeu masih membutuhkan perubahan mulai dari perubahan cara kerja anggota daerah seperti RT dan RW perlu pembinaan dalam hal keuangan untuk perubahan Kampung Pasir Bagadeu ke yang lebih baik lagi

Terdapat 384 Kartu Keluarga yang ada di Kampung Pasir Bagadeu RW 07, yang akan dibahas mengenai pendanaan pemasukan dan pengeluaran akan diambil dari RW 07, terdapat 4 Rukun Tetangga dan dari itu masing masing RT akan diambil sebagai bahan sampel. Dana yang didapat dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat pada saat acara maulid yang dialokasikan untuk membantu renovasi Masjid Al-Ikhlas Kampung Pasir Bagadeu RT 03 RW 07.

Tabel 1.2. Data Pengumpulan Dana Tahun 2023

Jumlah KK	Iuran Per 1 KK	Total
384	1.500.000	576.000.000

Sumber: Sekretariat RT 03 Kampung Pasir Bagadeu

Guna melancarkan pengumpulan dana diatas, sekretariat Kampung Pasir Bagadeu RT 03 memberlakukan sistem cicilan yaitu selama 3 kali pembayaran selama 3 bulan dan setiap bulannya hanya membayar lima ratus ribu rupiah agar tidak terlalu memberatkan masyarakat, Penggunaan Dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Kurangnya sifat profesionalisme berupa tindakan dari RT RW ketika terdapat masalah seperti kurangnya penyamarataan kepada semua warga pada saat pembuatan dokumen seperti Akta Kelahiran, KTP dan lain sebagainya.

2. Kurangnya pengelolaan dana sehingga permintaan pengumpulan dana pada warga yang terlalu sering untuk acara tertentu menimbulkan kesalahfahaman dan memperburuk kualitas keuangan di daerah Kampung Pasir Bagadeu.
3. Tidak adanya pembinaan dana keuangan pada RT, RW, dan warga sehingga mayoritas warga tidak mengerti mengenai pendanaan dan tugas anggota daerah dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai RT dan RW hingga terjadinya korupsi yang dilakukan secara berkala oleh anggota atas dana yang dikumpulkan oleh warga
4. Kinerja profesional, pembinaan dana dan pengelolaan keuangan yang tidak baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas keuangan di Kampung Pasir Bagadeu.

1.3 Pembatasan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang ada di Kampung Pasir Bagadeu menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Guna mencegah mengembangnya penelitian maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan, dan Intensitas Pembinaan Dana Terhadap Kualitas Keuangan Di Kampung Pasir Bagadeu.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah secara simultan profesionalisme, pengelolaan keuangan dan pembinaan dana berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
2. Apakah secara parsial pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
3. Apakah secara parsial profesionalisme kerja berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
4. Apakah secara parsial Intensitas Pembinaan Dana berpengaruh Terhadap Kualitas Keuangan Di Kampung Pasir Bagadeu?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan profesionalisme, pengelolaan keuangan dan pembinaan dana berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial profesionalisme kerja berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan di Kampung Pasir Bagadeu?
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial Intensitas Pembinaan Dana berpengaruh Terhadap Kualitas Keuangan Di Kampung Pasir Bagadeu?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai masukan oleh para anggota dan pemimpin daerah
2. Membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen keuangan serta melengkapi kajian-kajian teori yang telah ada khususnya yang berkaitan dengan Profesionalisme, Pengelolaan Keuangan, Intensitas Pembinaan, dan Kualitas Keuangan
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang manajemen keuangan

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.